

**ANALISIS FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA BUKITTINGGI**

TESIS

Oleh :



Pembimbing 1 : Dr. Asrinaldi, M.Si

Pembimbing 2 : Dr. Indraddin, M.Si

**KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILU
PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

ABSTRAK

Nama : Riki Rahmad (NIM. 1820869005)
Program Studi : Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang
Judul : Analisis Fasilitasi Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Bukittinggi

Fokus penelitian ini tentang fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi pada kampanye pemilu 2019. Permasalahan utamanya adalah banyaknya APK yang difasilitasi KPU tidak terpasang pada zona yang telah ditentukan bahkan ada yang tidak memanfaatkan fasilitasi APK ini, padahal anggaran yang disediakan lumayan besar, sehingga perlu dikaji kendala dan sejauh mana peran KPU Kota Bukittinggi dalam proses fasilitasi APK ini. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara pemakaian sistem pemilu proporsional terbuka dengan fungsi fasilitasi APK yang dilakukan KPU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk menganalisis data digunakan konsep IDEA dalam mewujudkan pemilu yang bebas dan adil yaitu Efisiensi, Profesional dan berorientasi pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi APK ini belum berjalan maksimal. Faktor penghambatnya antara lain jadwal fasilitasi yang tidak konsisten, ukuran dan isi APK yang dibatasi, tidak adanya biaya dari peserta pemilu untuk pemasangan APK dan juga sanksi dan aturan yang tidak tegas. Hasil penelitian mengenai tugas dan fungsi KPU dalam fasilitasi APK menyatakan bahwa KPU Kota Bukittinggi sudah bertindak profesional dan juga berorientasi pelayanan selama fasilitasi APK itu dapat dilihat dari terpenuhinya lima unsur "RATER" (*responsiveness, assurance, tangible, empathy dan reliability*), akan tetapi fasilitasi APK belum menerapkan prinsip efisiensi karena APK yang difasilitasi banyak yang tidak terpasang sehingga tujuan dari fasilitasi menjadi tidak tercapai. Disisi lain, Korelasi antara penggunaan sistem proporsional terbuka dengan fasilitasi APK yang dilakukan oleh KPU memang tidak sejalan. Dimana Fasilitasi APK yang dilakukan KPU bertujuan untuk membantu partai politik dalam berkampanye bertentangan dengan sistem pemilu proporsional terbuka yang lebih mengutamakan para calon legislatif dalam berkampanye. Faktanya, beberapa masalah yang diakibatkan karena tidak sinkronnya tujuan kampanye pada sistem pemilu proporsional terbuka dengan tujuan fasilitasi APK Pemilu 2019 menjadikan konsep manfaat kampanye dibiayai negara menjadi tidak berjalan maksimal.

Kata Kunci : Alat Peraga Kampanye, Pelanggaran Kampanye, Sistem Pemilu, Partai Politik, Desain APK

ABSTRACT

Name : Riki Rahmad (NIM. 1820869005)
Study Program : Master of Politic Sciences, Faculty of Social Sciences and Politics of Andalas University Padang.
Title of Thesis : Analysis of the Campaign Props Facilitation by the General Election Commission (KPU) at the 2019 General Elections in bukittinggi city

The focus of this research is on the facilitation of the Campaign Props (APK) in the form of banners and billboards carried out by the KPU Bukittinggi City in the 2019 election campaign. The main problem is that the number of APKs facilitated by KPU is not installed in the zones that have been determined and there are even parties that do not use this APK facilitation, even though the budget provided by KPU for this facilitation is quite large, so it is necessary to study the constraints and the extent of the role of KPU Bukittinggi in the facilitation process of this APK. This study also examines the relationship between the use of an open proportional electoral system and the APK facilitation function carried out by the KPU. This research uses a qualitative approach with a case study method. To analyze the data the IDEA concept is used in realizing free and fair elections namely Efficiency, Professional and service-oriented. The results showed that this APK facilitation policy has not yet run optimally. The inhibiting factors include an inconsistent facilitation schedule, the size and content of APKs that are limited, the absence of costs from election participants for installing APKs and also sanctions and unclear rules. The results of a review of the duties and functions of the KPU in APK facilitation state that the KPU has acted professionally and is also service oriented as long as the APK facilitation can be seen from the fulfillment of the five elements of "RATER" (responsiveness, assurance, tangible, empathy and reliability), however APK facilitation has not applying the principle of efficiency because many APKs that are facilitated are not installed so that the purpose of the facilitation is not achieved. On the other hand, the correlation between the use of an open proportional system and the APK facilitation carried out by the KPU is indeed not in line. Where the APK Facilitation carried out by KPU aims to assist political parties in campaigning contrary to the open proportional electoral system which prioritizes candidates in campaigning. The fact is that some of the problems caused by the asynchronous campaign objectives in the open proportional electoral system with the aim of facilitating the 2019 Election APK APK make the concept of campaign benefits financed by the state not running optimally. The fact is that some of the problems caused by the asynchronous campaign objectives in the open proportional electoral system with the aim of APK facilitation have made the concept of the benefits of state-funded campaigns not optimal.

Keywords : *Campaign Props, Campaign Violations, Election System, Political Parties, Design of campaign props*